

MENGURAI PERAN GANDA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KRITIS DI KAWASAN WISATA TAWANGMANGU)

Oleh

Purwanti¹, Samsi², Yitno Puguh Martomo³, Harjono⁴

¹Pemerintah Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

^{2,4}Program Studi Ilmu Administrasi, Program Magister, Universitas Surakarta

³Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Surakarta

Provinsi Jawa Tengah, Indonesia 57792

Email: ¹mbakpur80@gmail.com, ^{2*}samsirosi@uns.ac.id, ³tomounsa@gmail.com,

⁴harjono1571@gmail.com

Article History:

Received: 18-07-2025

Revised: 30-07-2025

Accepted: 21-08-2025

Keywords:

Local Government,
Sustainable Tourism,
Multiple Roles

Abstract: Sustainable tourism development poses a significant challenge for local governments in maintaining a balance between economic, social, and environmental interests. However, the multiple roles played by local governments often face structural and operational obstacles. This study aims to critically examine how the Karanganyar Regency Government fulfills its roles as a motivator, facilitator, and dynamizer in promoting sustainable tourism in the Tawangmangu tourism area. This research employs a qualitative approach using a case study strategy, collecting data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving informants from government agencies, tourism managers, business actors, and tourists. Data analysis follows the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings indicate that the facilitator role is the most dominant in tourism development efforts, while the roles of motivator and dynamizer are present but not yet optimal. Supporting factors include natural potential, local cultural richness, and policy support, while the main obstacles consist of limited budget allocation, weak cross-sector coordination, and low public awareness of environmental issues. The study concludes that strengthening multi-stakeholder collaboration and integrating cross-sectoral policies are strategic steps to ensure the sustainability of tourism in Tawangmangu

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak

dalam pengelolaan wilayah, memiliki peran penting dalam mengoptimalkan potensi pariwisata lokal melalui kewenangan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditetapkannya Undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola urusan pilihan seperti pariwisata, yang jika dikelola secara strategis dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan

Menapak perjalanan sejarah, pariwisata telah berkembang menjadi sektor unggulan yang mampu mendorong pendapatan negara dan daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sektor ini menyumbang devisa

sebesar US\$4,26 miliar, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan pesat sektor pariwisata juga membawa dampak negatif, seperti kemacetan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial budaya. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (UNWTO, 2005). Di Indonesia, kebijakan ini diperkuat melalui Permenparekraf. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya tata kelola yang *inklusif* dan *partisipatif*. Salah satu wilayah yang mencerminkan dinamika tersebut adalah Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar, yang kaya akan potensi wisata alam dan budaya, namun menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk itu, paradigma pariwisata berkelanjutan menjadi penting untuk diterapkan. Pariwisata berkelanjutan menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Pendekatan ini juga tercermin dalam Permenparekraf. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya tata kelola yang *inklusif*, pelibatan masyarakat, serta keberpihakan pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Beberapa studi sebelumnya menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata. Pitana dan Gayatri (2005) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Bramwell dan Lane (1993) juga menggarisbawahi perlunya keterpaduan antara kebijakan publik dan partisipasi komunitas untuk mencapai keberlanjutan. Lebih lanjut, Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa dalam konteks administrasi publik, peran pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor. Pengembangan pariwisata melalui model pemberdayaan, menunjukkan bahwa komitmen para pemimpin desa mendukung proses pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Berjo, sehingga dukungan yang kuat dari pimpinan dapat menumbuhkan inovatif dan semangat untuk menarik lebih banyak pengunjung untuk menikmati wisata spiritual dan berkemah di malam hari ke Telaga Madirda, Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar (Yitno Puguh Martomo, et al., 2022). Akan tetapi, kajian yang secara spesifik mengulas efektivitas ketiga peran ini dalam konteks destinasi wisata seperti Tawangmangu masih terbatas.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan potensi wisata besar mencatat kunjungan wisatawan domestik hingga 29,4 juta dan mancanegara sebanyak 131.000 pada tahun 2023 (BPS, 2023). Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah di Jawa

Tengah yang memiliki kekayaan potensi pariwisata, terutama di Kecamatan Tawangmangu, seperti Air Terjun Grojogan Sewu, Bumi Perkemahan Sekipan, Wonder Park, Wana Wisata Pringgondani, Puncak Lawu, Air Terjun Kedung Sriti, The Lawu Park, Sakura Hills, Embun Lawu, Bukit Sekipan, Taman New Balekambang, Rumah Atsiri Indonesia, Desa Wisata Sewu Kembang, Pasar Wisata Tawangmangu, Bukit Mongkrang, Umbul Udal-udalan, Pemandian air hangat Cumpleng, Jabal Kanil, Situs Menggung, Bumi Perkemahan Pleseran, Wisata Kuliner Jalan Tembus Tawangmangu dan banyak lagi destinasi wisata lainnya yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Namun demikian, pengembangan pariwisata di Tawangmangu belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan. Masih terdapat berbagai persoalan seperti kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah yang belum optimal, degradasi lingkungan, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif dan strategis dari pemerintah daerah, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Beberapa studi sebelumnya menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata. Pitana dan Gayatri (2005) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Bramwell dan Lane (1993) juga menggarisbawahi perlunya keterpaduan antara kebijakan publik dan partisipasi komunitas untuk mencapai keberlanjutan. Lebih lanjut, Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa dalam konteks administrasi publik, peran pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pembangunan.

Akan tetapi, kajian yang secara spesifik mengulas efektivitas ketiga peran ini dalam konteks destinasi wisata seperti Tawangmangu masih terbatas. Dalam kaitanya peran, kebijakan dan keterpaduan antara kebijakan publik dan partisipasi Samsi (2021), pemerinatah dalam mengambil kebijakan sebagai proses legitimasi yang dilakukan secara prosedural dengan pelibatan institusi Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar melalui perguliran Kartu Sanitasi (KARSA) mampu memperoleh dukungan dari semua stakeholders. sehingga kebijakan dan peran Prmetintah ini berjalan efektif juga secara filosofis ada nilai rasional yang mewujudkan kepuasan kerja bagi pemerintah dan semua stakehorders termasuk masyarakat penerima manfaat layanan sedot lumpur tinja gratis dari program yang digulirkan.

Kebaruan ilmiah dari kajian ini terletak pada analisis kritis terhadap *peran ganda* pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan, dengan fokus pada implementasi tiga fungsi utama pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator yang jarang dibahas secara simultan dalam literatur sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengkombinasikan pendekatan teoritik administrasi publik dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal.

Berdasarkan latar belakang dan telaah literatur tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Sejauh mana efektivitas peran ganda pemerintah daerah (sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator) dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar? Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara kritis peran pemerintah daerah

dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata Tawangmangu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi penguatan kebijakan berbasis kolaborasi dan potensi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran ganda pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam menggali realitas sosial, peran aktor, serta dinamika kebijakan yang terjadi secara kontekstual dan kompleks, khususnya dalam kerangka tata kelola pembangunan pariwisata. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus *intrinsik*, dengan fokus pada satu lokasi yang memiliki karakteristik khas dan relevan dengan tujuan penelitian (Yin, 2014). Kecamatan Tawangmangu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar, namun juga menghadapi tantangan serius dalam keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola.

1. Informan dan Teknik Pengambilan Data

Informan dipilih secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pengetahuan yang dimiliki terkait isu penelitian. Kriteria informan meliputi:

- Pejabat/staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
- Aparat Pemerintah Kecamatan Tawangmangu
- Pelaku usaha pariwisata (pengelola destinasi, pemilik *homestay*, pemandu wisata)
- Tokoh masyarakat lokal
- Wisatawan domestik dan manca negara yang pernah mengunjungi Tawangmangu

2. Teknik pengumpulan data terdiri dari:

- Wawancara mendalam**, untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator serta dinamika kebijakan yang diterapkan.
- Observasi partisipatif**, untuk melihat secara langsung interaksi antara pelaku wisata, pengelolaan destinasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata.
- Studi dokumentasi**, meliputi analisis dokumen perencanaan pembangunan daerah, regulasi sektor pariwisata, laporan program, dan data statistik dari instansi terkait.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari tiga tahap utama:

- Reduksi data**: seleksi, kategorisasi, dan penyederhanaan data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Penyajian data**: dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk memudahkan interpretasi temuan.
- Penarikan kesimpulan dan verifikasi**: dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian dengan menguji konsistensi dan validitas temuan.

4. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan dibandingkan dan diverifikasi melalui pendekatan triangulasi. Selain itu, dilakukan *member*

check dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Strategis Kawasan Tawangmangu

Kecamatan Tawangmangu memiliki potensi geografis dan ekologis yang menjadikannya destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Karanganyar. Berada di lereng Gunung Lawu, kawasan ini menawarkan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang terintegrasi, seperti Air Terjun Grojogan Sewu, Rumah Atsiri Indonesia, hingga desa wisata tematik. Temuan ini memperkuat pernyataan Bramwell & Lane (1993) bahwa keberagaman atraksi dan potensi lokal merupakan fondasi keberhasilan destinasi wisata berkelanjutan.



Gambar 1. Grojogan Sewu
Sumber : 1001indonesia.net

Namun, pertumbuhan kunjungan wisatawan yang tinggi belum diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan tata kelola lingkungan yang optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya *tourism pressure*, yakni tekanan akibat overkapasitas destinasi, yang apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan degradasi lingkungan dan sosial.



Gambar 2. Rumah Atsiri Indonesia
Sumber : travelingyuk.com

2. Temuan Ilmiah: Peran Ganda Pemerintah Daerah

a. Peran sebagai Motivator

Pemerintah daerah telah menjalankan peran motivator melalui program pelatihan sadar wisata, penyuluhan pelestarian lingkungan, dan edukasi budaya lokal. Temuan ini menunjukkan adanya inisiatif edukatif yang sejalan dengan prinsip *community*

empowerment dalam pariwisata berkelanjutan (UNWTO, 2005). Namun, *disparitas* tingkat partisipasi antar desa wisata menunjukkan bahwa pendekatan belum inklusif. Hal ini menandakan lemahnya pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan pariwisata dan keterbatasan literasi pariwisata masyarakat setempat.

b. Peran sebagai Fasilitator

Temuan memperlihatkan bahwa Pemkab Karanganyar telah membangun infrastruktur dasar dan memfasilitasi digitalisasi promosi wisata. Salah satu pencapaian strategis adalah penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) yang mencantumkan prinsip keberlanjutan.

Namun demikian, berbagai destinasi masih menghadapi persoalan klasik seperti kemacetan, minimnya fasilitas ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah yang belum terpadu. Secara ilmiah, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang berbasis data spasial dan zonasi ketat.

c. Peran sebagai Dinamisator

Pemerintah berperan dalam membentuk kemitraan dengan pelaku UMKM, pengelola wisata, dan desa wisata. Namun, koordinasi lintas sektor dan sinergi antar-dinas belum berjalan optimal. Kelemahan ini menggambarkan lemahnya *policy coherence* dalam tata kelola pariwisata lintas level pemerintahan. Fenomena ini mendukung temuan Pitana dan Gayatri (2005) yang menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan dan tata kelola inklusif sebagai fondasi keberlanjutan pariwisata.



Gambar 3. The Lawu Park

Sumber : Gramedia.com

3. Analisis Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

a. Dimensi Ekonomi

Dampak ekonomi positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan tumbuhnya UMKM pariwisata cukup terlihat. Namun, pendapatan yang bersifat musiman dan terbatas pada sektor informal menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum ada strategi *value chain integration* untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi jangka panjang.

b. Dimensi Sosial Budaya

Pelestarian tradisi lokal dan festival budaya menjadi instrumen pemerintah dalam memperkuat identitas budaya. Namun, terdapat kecenderungan komersialisasi budaya

dan terjadinya *cultural dilution*. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang menyeimbangkan antara *cultural preservation* dan kebutuhan pariwisata, sebagaimana dikemukakan oleh Middleton & Hawkins (1998).

c. Dimensi Lingkungan

Kebijakan larangan plastik dan program kebersihan komunitas merupakan inisiatif positif. Namun, masalah seperti peningkatan sampah dan alih fungsi lahan belum ditangani secara sistematis. Fakta ini mencerminkan bahwa regulasi tata ruang dan *environmental impact assessment* belum diterapkan secara konsisten dan ketat.

4. Sintesis Teori dan Temuan

Mengacu pada teori peran pemerintahan dalam pembangunan berkelanjutan (Pitana & Gayatri, 2005), pengembangan pariwisata yang efektif harus melibatkan partisipasi masyarakat, menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, serta memiliki tata kelola yang transparan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian elemen ini mulai diterapkan, namun belum terintegrasi secara menyeluruh. Inkonsistensi kebijakan dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi kendala utama dalam optimalisasi peran pemerintah.

Temuan ini juga mendukung studi Dwiyanto (2006) dan Widianingsih & Morrell (2007) yang menyatakan bahwa kegagalan peran dinamisator dalam tata kelola kolaboratif sering kali disebabkan oleh birokrasi sektoral dan rendahnya *political will* untuk menciptakan sinergi antar aktor.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memainkan peran ganda dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tawangmangu, yakni sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator tampak paling dominan melalui penyediaan infrastruktur dan promosi wisata, sementara peran sebagai motivator dan dinamisator masih berjalan secara parsial dan belum terstruktur secara optimal.

Secara ilmiah, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada ketersediaan potensi alam dan budaya, tetapi juga pada efektivitas tata kelola, kualitas koordinasi lintas sektor, serta tingkat partisipasi aktif masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan di Tawangmangu masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya integrasi kebijakan, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta belum meratanya literasi pariwisata di tingkat komunitas.

Dari dimensi ekonomi, pariwisata telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, namun belum menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang karena masih bergantung pada sektor informal dan musiman. Pada aspek sosial budaya, pelestarian tradisi lokal mendapat dukungan, namun risiko komoditas budaya memerlukan regulasi yang protektif. Sementara dari aspek lingkungan, inisiatif hijau sudah mulai dijalankan tetapi belum cukup kuat dalam menghadapi tekanan pembangunan dan peningkatan kunjungan wisatawan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah daerah harus diarahkan pada peningkatan sinergi lintas aktor, pemutakhiran kebijakan berbasis data, serta penguatan kapasitas lokal dalam mengelola pariwisata berkelanjutan secara

holistik. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten untuk mewujudkan destinasi wisata yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berdaya tahan secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, A., Sunarti, & Hakim, L. (2017). *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi pada Disbudparpora Kabupaten Gresik)*. Universitas Brawijaya.
- [2] Ahmad, S. (2016). *Pengembangan pariwisata berkelanjutan: Teori dan praktik*. Kencana.
- [3] Alfianto, F. Y. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Pakuncen. *Paradigma*, 10(1).
- [4] Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- [5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2023). *Kecamatan Tawangmangu dalam angka 2023*. BPS Karanganyar.
- [6] Bappenas. (2002). *Good governance: Pengertian, prinsip, dan penerapannya dalam pembangunan daerah*. Bappenas.
- [7] Biantoro, A. (2014). *Dampak sosial budaya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Andi.
- [8] Bogdan, R., & Taylor, S. (1992). *Pengantar metode kualitatif*. Usaha Nasional.
- [9] Bovaird, T., & Löffler, E. (2003). *Public management and governance*. Routledge.
- [10] Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable tourism: An evolving global approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.1080/09669589309450696>
- [11] Cahyaningrum, A. N. (2021). *Implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Kalongan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah* [PhD thesis, IPDN Jatinangor]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6143/>
- [12] Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and practice*. Pearson Education.
- [13] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- [14] Dahlan, A. (1994). *Sosiologi: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- [15] Damanik, J., & Weber, H. (2006). *Perencanaan ekowisata dari teori ke aplikasi*. PUSPAR UGM.
- [16] Dewi, P. S. W., Lilasari, L. N. T., & Saputra, I. G. G. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata Pakseballi di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 1(1), 52–62.
- [17] Dharma, A. (2018). *Sosiologi pemerintahan: Teori dan praktik*. Kencana.
- [18] Dunn, W. N. (1998). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Terj.). Gadjah Mada University Press.
- [19] Dwijowijoto, S., & Wrihatnolo, M. (2006). *Peran pemerintah dalam pembangunan nasional*. Pustaka Pelajar.
- [20] Dye, T. R. (1975). *Understanding public policy*. Prentice-Hall.
- [21] Ekarishanti, C., & Kismartini, K. (2019). Voluntary instrument pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 102–116.

- [22] Gamal Suwanto. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Andi Offset.
- [23] Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat*. Pusat Pelajar.
- [24] Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). *Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach*. Routledge.
- [25] Indonesia. (1969). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pengembangan Sektor Pariwisata*. Sekretariat Negara.
- [26] Indradi, S. S. (2006). *Dasar-dasar dan teori administrasi publik*. Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- [27] Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. Van Nostrand Reinhold.
- [28] Juwita, A. R., & Rahmafitria, F. (2017). Pengaruh persepsi masyarakat terhadap pengembangan desa wisata Ciburial Kabupaten Bandung. *Tourism Scientific Journal*, 3(1), 1–17.
- [29] Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gava Media.
- [30] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Pedoman pariwisata berkelanjutan di Indonesia*. Kemenparekraf RI.
- [31] Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan desa wisata berbasis collaborative governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84.
- [32] Kotler, P., Bowen, J. T., & Makens, J. C. (2014). *Marketing for hospitality and tourism*. Pearson.
- [33] Kurniawati, D. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata Dieng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 145–160.
- [34] Kurniawati, N. (2013). *Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata alam*. Deepublish.
- [35] Lea, J. (1998). *Tourism and development in the Third World*. Routledge.
- [36] Lindblom, C. E. (1986). The science of muddling through. Dalam Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.
- [37] Martomo, Y. P., Samsi, S., Anafih, E. S., & Sin, L. G. (2022). Empowerment models of Telaga Madirda tourism management to increase visitors during the COVID-19 pandemic. *Society*, 10(2), 706–722. <https://doi.org/10.33019/society.v10i2.498>
- [38] Mayasari, N., & Ramdhan, M. R. (2013). *Strategi pengembangan agrowisata perkotaan*. Universitas Padjadjaran Press.
- [39] Middleton, V. T. C., & Clarke, J. (2001). *Marketing in travel and tourism*. Butterworth-Heinemann.
- [40] Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [41] Muluk, K. (2005). *Desentralisasi dan pemerintah daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Bayumedia Publishing.
- [42] Musanef. (1995). *Manajemen usaha pariwisata di Indonesia*. PT Toko Gunung Agung.
- [43] Nainggolan, C. R. A. (2023). *Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Samosir (Studi pada Kampung Ulos Hutaraja)*. Universitas Diponegoro.

- [44] Nilawati, N., Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(5), 1858–1873.
- [45] Nugroho, I. (2011). *Ekowisata dan pembangunan berkelanjutan*. Pustaka Pelajar.
- [46] Pasolong, H. (2008). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- [47] Pasolong, H. (2012). *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta.
- [48] Pitana, I. G. (2002). *Pengantar ilmu pariwisata*. Andi Offset.
- [49] Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Andi Offset.
- [50] Priasukmana, S., & Mulyadin, R. M. (2001). Pembangunan desa wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*.
- [51] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 11.
- [52] Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- [53] Robert, A., & Arida, I. N. S. (2003). *Pariwisata berkelanjutan: Teori dan implementasi*. Andi Offset.
- [54] Rochim, A. (2018). *Peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul (Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.
- [55] Saldana, J., Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- [56] Samsi, Widyantoro Yuliatmojo, 2021; *Efektivitas Kebijakan Kartu Sanitasi Dan Model Pelibatan Zakat Dalam Layanan Sedot Lumpur Tinja Gratis Di Kabupaten Karanganyar*, Jurnal Moderat, Volume 7, Nomor, Februari 2021, (179-181)
- [57] Saparin, S. (1979). *Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- [58] Sekarini, D. A. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Mojokerto*. Universitas Brawijaya.
- [59] Sharpley, R. (2009). *Tourism development and the environment: Beyond sustainability?* Earthscan.
- [60] Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan*. Bumi Aksara.
- [61] Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.
- [62] Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- [63] Spillane, J. J. (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat ekonomi dan rekayasa kebudayaan*. Kanisius.
- [64] Sudarmo, A. (2011). *Manajemen konflik: Teori, praktik dan riset di Indonesia*. Graha Ilmu.
- [65] Sudibya, B. (2018). Wisata desa dan desa wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.
- [66] Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- [67] Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [68] Sutiani, N. W. (2021). Peran serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan desa wisata di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 70–79.
- [69] Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable tourism management*. CABI Publishing.
- [70] Syafiie, I. (2006). *Ilmu administrasi publik: Suatu pengantar*. Rineka Cipta.
- [71] Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengembangan

- dan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata (studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380.
- [72] Thoha, M. (2012). *Perilaku organisasi*. RajaGrafindo Persada.
- [73] UNWTO. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. United Nations Environment Programme & World Tourism Organization.
- [74] UNWTO. (2017). *Sustainable tourism for development*. World Tourism Organization.
- [75] Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa*. RajaGrafindo Persada.
- [76] Wibowo, A. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata alam. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- [77] Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.
- [78] World Tourism Organization. (2018). *Tourism for sustainable development in least developed countries*. WTO.
- [79] Yoeti, O. A. (2007). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradaya Paramita. *Jurnal Moderat*, Volume 7, Nomor, Februari 2021, (179-181)
- [80] Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi pariwisata*. Kompas Media Nusantara.

HALAMAN INI SENGAJ ADIKOSONGKAN